



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Tim Penyusun

Wawan Andriyanto, S.Pi. M.Sc.

Ketut Sutaryasa, S.PKP.

Maria Niken Tri Ubaya Sakti, S.Pi

Ida Komang Wardana, S.Si

Kadek Adi Chandra Kusuma, S.St.Pi

Sujannah, S.Akt.

I Komang Suarsana, S.PKP.

Ni Luh Erawati, S.A.P.

Hirmawan Tirta Yudha, S.Pi, M.Si.

Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Triwulan II Tahun 2025” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan II TA 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan serta manajerial dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Gondol, 12 Juli 2025

Kepala Balai Besar Riset Budidaya
Laut dan Penyuluhan Perikanan



Zwan Andriyanto, S.Pi., M.Sc.

NIP. 19780502 200502 1 001

Jkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan perikanan (BBRBLPP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai BBRBLPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBRBLPP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan pada triwulan II tahun 2024 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BRSDM KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja BBRBLPP triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BBRBLPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBRBLPP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan manajerial yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Selama triwulan II T.A. 2025, dari 9 IK yang tercapai targetnya tersebut, 8 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 1 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja, untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi dari 9 IKU tersebut adalah:

1. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 1.500 kelompok, tercapai 1.800 kelompok;

2. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 10 kelompok, tercapai 12 kelompok;
3. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 100 kelompok, tercapai sebanyak 120 kelompok;
4. Nilai PNPB Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) dengan target triwulan II sebesar 0,030 Rupiah Milyar, tercapai sebanyak 0,98 Rupiah Milyar;
5. Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit) dengan target triwulan II sebesar 10 unit, tercapai sebanyak 12 unit;
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%) dengan target triwulan II sebesar 85, tercapai sebesar 85;
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) dengan target triwulan II sebesar 84, tercapai sebesar 99,96;
8. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) dengan target triwulan II sebesar 70, tercapai sebesar 78,84;
9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) dengan triwulan II sebesar target 80, tercapai sebesar 100.

Selama triwulan II T.A. 2024, ada permasalahan yang di hadapi BBRBLPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah Adanya kebijakan efisiensi anggaran beberapa aset BMN tidak dapat dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap target capaian PNPB balai dari pendapatan fungsional, tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan capaian pada akhir triwulan II. Secara keseluruhan pendapatan PNPB tercatat pada aplikasi di akhir bulan Juni sebesar 21% dari target perencanaan sebesar 45% dengan total target nilai PNPB Balai berdasarkan Dokumen perjanjian kinerja sejumlah Rp. 552.000.000,-

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu mengikuti arahan Plt Kepala Balai bahwa aset BMN yang telah digunakan untuk kegiatan SFV diupayakan tetap berjalan sesuai dengan kemampuan organisasi, dan aset BMN yang lainnya disarankan untuk dilakukan pembersihan/pemeliharaan berdasarkan dari skala prioritas.

Sampai dengan triwulan II T.A. 2025, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan secara optimal berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

rencana strategis. Sementara untuk beberapa program/ kegiatan yang capaian kinerjanya belum memiliki target akan direncanakan tercapai pada triwulan berikutnya.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	7
1.4. Keragaan SDM (Kekuatan SDM).....	7
1.5. Potensi dan Permasalahan	8
1.6. Sistematika LKj.....	12
Bab II. Perencanaan & Perjanjian Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis	14
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja	19
2.4. Pengukuran Kinerja	20
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Evaluasi Dan Analisis Kinerja	24
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	25
3.4. Hasil Pengukuran BBRBLPP.....	26
SS1: Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	26
IKU 1. : Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP	26
IKU 2. : Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP	29
IKU 3: Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (kelompok)	31
IKU 4.: Nilai PNBP Satker BBRBLPP	34
IKU 5: Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit)	36
SS2.: Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	38
IKU 6.: Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha Di Satker BBRBLPP (Paket)	38
SS3.: Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	40
IKU 7.: Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) .	40
IKU 8.: Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	43
SS3. : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	46
IKU.9 : Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	46
IKU 10.: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP	48
IKU 11.: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	50
IKU 12.: Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP	52



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

IKU 13.: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	54
IKU 14.: Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP	57
IKU 15.: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	62
IKU 16.: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	65
Bab IV. Penutup	73
4.1. Permasalahan Dan Tindak Lanjut	74
4.2. Saran Dan Rekomendasi	75
4.3. Kesimpulan	75
Lampiran	76

Daftar Tabel

Tabel I. 1. Keragaan SDM Triwulan II TA 2025	8
Tabel II. 1. Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BPPSDM KP	15
Tabel II. 2. Rencana Kerja BBRBLPP TA 2025	18
Tabel II. 3. Perjanjian Kinerja BBRBLPP TA 2025	19
Tabel II. 4. Bobot validasi IKK	20
Tabel II. 5. Klasifikasi target indikator kinerja	22
Tabel II. 6. Status Capaian Nilai Kinerja	22
Tabel III. 2. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel III. 3. Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	27
Tabel III. 4. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain	28
Tabel III. 5. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025	30
Tabel III. 6. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan	30
Tabel III. 7. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	32
Tabel III. 8. Perbandingan Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain	33
Tabel III. 9. Capaian IKU Nilai PNBSP Satker BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel III. 10. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBSP Satker BBRBLPP dengan Satminkal Lain Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain	35
Tabel III. 11. Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit) pada Triwulan II Tahun 2025	37
Tabel III. 12. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain	38
Tabel III. 13. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	39
Tabel III. 14. Perbandingan Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP (paket) Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain	40
Tabel III. 15. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) pada Triwulan II Tahun 2025	41
Tabel III. 16. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	42
Tabel III. 17. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) pada Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel III. 18. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	45
Tabel III. 19. Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) pada Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel III. 20. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/ atau ditindaklanjuti BBRBLPP pada triwulan II tahun 2025	47



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Tabel III. 21. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	48
Tabel III. 22. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP	49
Tabel III. 23. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP	51
Tabel III. 24. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP	52
Tabel III. 25. Kategori Nilai PM SAKIP	53
Tabel III. 26. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP	53
Tabel III. 27. Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP	54
Tabel III. 28. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	56
Tabel III. 29. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP	56
Tabel III. 30. Indikator Riwayat Pendidikan Formal Terakhir yang Telah Dicapai	58
Tabel III. 31. Riwayat Pengembangan Kompetensi	58
Tabel III. 32. Indikator Penilaian Prestasi Kerja PNS	59
Tabel III. 33. Indikator Riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin	59
Tabel III. 34. Kategori Penilaian IP ASN	60
Tabel III. 35. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025	61
Tabel III. 36. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	61
Tabel III. 37. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) pada Triwulan II Tahun 2025	63
Tabel III. 38. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ	64
Tabel III. 39. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	66
Tabel III. 40. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	66
Tabel III. 41. Tabel realisasi anggaran triwulan II TA 2025 per Sasaran Kegiatan	68
Tabel III. 42. Pagu dan Realisasi Anggaran Pendukung IKU Lingkup BBRBLPP	68
Tabel III. 43. Perhitungan Efisiensi Anggaran BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025	70



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi BBRBLPP	7
Gambar 1. 2. Keragaan SDM Triwulan II TA 2025.....	8
Gambar 1. 3. Dashboard Capaian Kinerja BBRBLPP Triwulan II TA. 2025.....	23
Gambar 4. 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku http://kinerjaku.kkp.go.id	73

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen BBRBLPP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan penyuluhan dan manajerial pada akhir periode pengukuran triwulan II tahun 2025. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan penyuluhan Perikanan.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program- program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPSDM KP tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program- program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPSDM KP tahun 2020-2024.

Acuan dalam penyusunan LKj Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Laporan Kinerja BBRBLPP triwulan II Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BBRBLPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBRBLPP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan manajerial yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan triwulan II Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BBRBLPP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) sebagai instansi pemerintah dan penyelenggara negara telah menetapkan target kinerja dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja BBRBLPP sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBRBLPP ini, yaitu :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BBRBLPP kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja triwulan selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas, Fungsi BBRBLPP dan Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 797/Kpts/OT.210/12/1994, Loka Penelitian Perikanan Pantai (Lolitkanta) Gondol, memiliki mandat melakukan penelitian perbenihan perikanan Pantai. Dengan bekerjasama pemerintah Jepang melalui proyek JICA ATA-379 selama kurun waktu 11 tahun (tahun 1989 s/d tahun 2000), maka Lolitkanta Gondol telah mengembangkan Multi Species Hatchery dan telah menghasilkan beberapa teknologi perbenihan yang telah diadopsi oleh pengguna, yaitu; perbenihan udang, bandeng, kerapu bebek, kerapu macan dan kerapu lumpur yang kesemuanya telah mampu memproduksi skala masal. Di tahun berikutnya, telah berhasil pula dilakukan perbenihan kepiting bakau, rajungan, kerapu sunu, ikan cobia dan ikan hias.

Pada tanggal 31 Juli 2000, Loka Penelitian Perikanan Pantai (Lolitkanta) Gondol yang awalnya berada di bawah Departemen Pertanian beralih dibawah Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 73 tahun 2000. Kemudian dengan terbentuknya Badan Riset Kelautan dan Perikanan serta Pusat Riset

Perikanan Budidaya, maka berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 Mei 2001 No. 26A/MEN/2001, Lolitkanta Gondol berubah menjadi Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut (BBRPBL), dan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 26 September 2011 nomor PER 26/MEN/2011 berubah menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, lalu berdasarkan Permen KP RI Nomor 22/PERMEN-KP/2017, Tanggal 27 Maret 2017, berubah nama menjadi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dengan mandat melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan, disempurnakan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020, dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang sama, namun struktur organisasi yang lebih sederhana.

Tugas

Tugas pokok BBRBLPP adalah melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan;
- b) pelaksanaan riset budidaya laut dibidang biologi, reproduksi, genetika, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, patologi, ekologi dan lingkungan budidaya laut, serta pengembangan teknologi budidaya laut;
- c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset budidaya laut;
- d) penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- e) penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- f) pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan; dan
- g) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Setiap unsur di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b. Kepala Subbagian Umum pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Susunan organisasi Balai Besar Riset Budidaya

Laut dan Penyuluhan Perikanan terdiri atas: Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

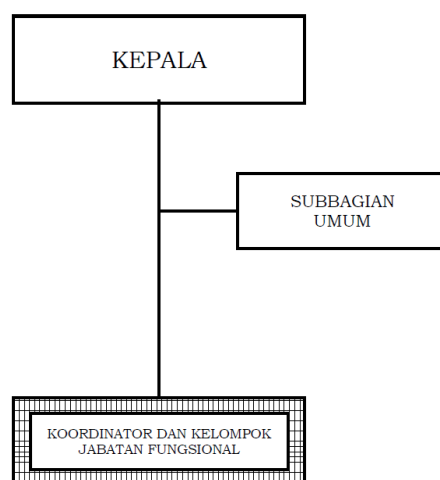
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jabatan fungsional yang ada saat ini di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan adalah jabatan fungsional analis kepegawaian, pranata humas, perencana, pranata keuangan APBN, pustakawan dan pranata komputer.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.70/PERMEN-KP/2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I BRSDM dan dibina secara teknis oleh Pusat Riset Perikanan (Puriskan).

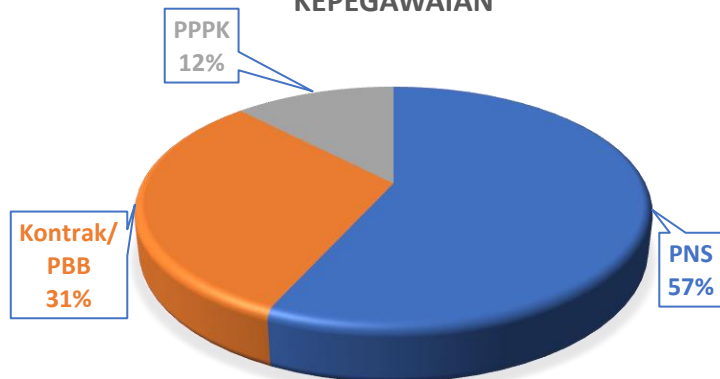
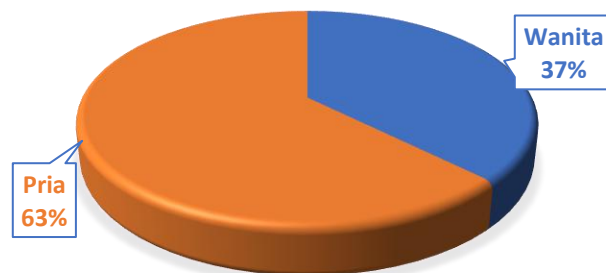
Susunan organisasi BBRBLPP sebagaimana dimaksud di atas, selengkapnya terlihat pada Gambar 1.1. sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi BBRBLPP

1.4. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)

Kapasitas sumberdaya manusia dalam menunjang sasaran kegiatan BBRBLPP merupakan faktor yang sangat vital untuk menghasilkan output yang berkualitas dan dapat diserap oleh stakeholder. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BBRBLPP pada Juni tahun 2024 berjumlah 500 orang dengan rincian sebagai berikut:

KERAGAAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAAN

KERAGAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN


Gambar 1. 2. Gambar Keragaan SDM BBRBLPP TRIWULAN II TA 2025

Tabel I. 1. Keragaan SDM Triwulan II TA 2025

Status	Riset	Penyuluh	Jumlah
PNS	36	228	264
Kontrak / PPB	18	126	144
CPNS	0	0	0
PPPK	2	55	57
Jumlah	56	409	465

Jenis Kelamin	PNS Riset	PPPK Riset	PPNPN	PNS Penyuluh	PPB	PPPK	Jumlah
Wanita	6	0	3	95	49	21	174
Pria	30	2	15	133	77	34	291
Jumlah	36	2	18	228	126	55	465

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa hingga bulan Juni dari jumlah total pegawai BBRBLPP sebanyak 465 orang terdiri dari 264 orang PNS (57%), 144 tenaga kontrak/ PPB (31%) dan 57 orang tenaga PPPK (12%) Dari jumlah pegawai sebanyak 465 orang terdiri 174 pegawai wanita (73%) dan 291 pegawai pria (63%).

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), BBRBLPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan memiliki tugas melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan;
- b. pelaksanaan riset budidaya laut dibidang biologi, reproduksi, genetik, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, pathologi, ekologi dan lingkungan budidaya laut, serta pengembangan teknologi budidaya laut;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset budidaya laut;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

a) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Peneliti, Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Humas, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional peneliti, penyuluh maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset Balai yang meliputi tanah, bangunan kantor,

guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan dalam pengelolaan riset, penyuluhan, dan pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan penelitian dapat berasal dari kegiatan kerjasama riset dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (renewable resources) dan tidak terbarukan (non-renewable resources). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (ocean thermal energy conversion). Sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources) meliputi minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi antara lain ikan tuna sirip kuning, kakap putih, kerapu sunu, abalone, teripang, dan lobster untuk dikembangkan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara ilmiah.

Peningkatan produksi perikanan dapat dicapai melalui inovasi teknologi yang efektif dan efisien, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. Berbagai komponen dan paket teknologi perikanan telah banyak dihasilkan oleh BBRBLPP yang dihasilkan ini harus segera secara intensif dikomunikasikan kepada pengguna agar dapat diimplementasikan dalam usaha yang riil sebagai upaya peningkatan efisiensinya. Aplikasi teknologi yang lebih inovatif akan menjadikan sektor perikanan menjadi ladang usaha yang lebih menarik bagi masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan yang menguntungkan.

Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah melaksanakan kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) di beberapa lokasi, SFV ini merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) program SFV diarahkan pada pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN) yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara optimal sehingga tidak ada lagi asset idle atau tak dimanfaatkan. Disamping itu potensi SDM Penyuluhan yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Bali, NTB, NTT dan Kalimantan tengah menjadi ujung tombak pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh BBRBLPP.

1.5.2. Permasalahan

Pada kegiatan di BBRBLPP terdapat beberapa permasalahan, diantaranya belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BBRBLPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BBRBLPP. Pada kegiatan penyuluhan beberapa permasalahan yang ditemukan dari aspek penyelenggaraan maupun ketenagaan penyuluhan antara lain:

- a. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- b. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan dan jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- d. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- e. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- f. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- g. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasi;
- i. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- j. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- k. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Sedangkan permasalahan dari aspek dukungan manajerial terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan efisiensi anggaran beberapa aset BMN tidak dapat dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap target capaian PNBK balai dari pendapatan fungsional, tidak terealisasi sesuai

dengan perencanaan capaian pada akhir triwulan II. Secara keseluruhan pendapatan PNPB tercatat pada aplikasi di akhir bulan Juni sebesar 21% dari target perencanaan sebesar 45% dengan total target nilai PNPB Balai berdasarkan Dokumen perjanjian kinerja sejumlah Rp. 552.000.000,-

1.6. Sistematika LKj

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan pada triwulan II Tahun 2024. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) tahunan dan target triwulan II tahun 2024. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BBRBLPP selama kurun waktu Triwulan II tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan hal-hal umum tentang BBRBLPP serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BBRBLPP, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menyajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BBRBLPP pada tahun 2020–2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2022, penetapan kinerja BBRBLPP serta pengukuran/ pengelolaan kinerja BBRBLPP.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, yang menyajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BBRBLPP serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, menyajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

Bab II.

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi

Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan
6. SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel II. 1. Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BPPSDM KP

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong	Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
		2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
	Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.

Visi	Misi	Tujuan
	Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

Arah Kebijakan

Arah kebijakan menetapkan agenda prioritas dalam rangka pemulihan kesehatan laut serta percepatan pertumbuhan ekonomi kelautan berkelanjutan dengan 5 strategi kebijakan

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut,
2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota,
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan,
4. Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
5. Pembersihan Sampah Plastik, melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kunci keberhasilan penerapan ekonomi biru (*blue economy*) dimaksud adalah ketersediaan SDM Unggul yang akan didukung melalui strategi sinergi kegiatan BPPSDM dalam bentuk Vocational Goes to Actor (VOGA), pelatihan, dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

VOGA sebagai salah satu program prioritas BPPSDM yang mengkolaborasikan tiga fungsi BPPSDM, yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi KKP yang berbasis kompetensi dengan penerapan kepada masyarakat KP dilakukan langsung di lokasi pengembangan program prioritas KKP. Implementasi VOGA dituangkan dalam kegiatan: Kampung Nelayan Modern (Kalamo), dan lokasi potensi perikanan lainnya melalui strategi VOGA berkonsep *Smart Fisheries Village* (SFV). Implementasi SFV BPPSDM tahun 2025 di BBRBLPP tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran.

BPPSDM berkomitmen untuk melakukan dukungan kegiatan penyuluhan terhadap program prioritas KKP melalui 1) pendampingan oleh penyuluh perikanan pada program prioritas KKP, 2) penyiapan road map penyuluhan tahun 2024-2029, 3) penguatan sistem informasi penyuluhan 4) revaluasi NSPK terkait penyuluhan dan 5) penguatan penguasaan metodologi penyuluhan untuk penyuluh perikanan.

Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
- SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
- SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)
- SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
- SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
- SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan
- SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Sedangkan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

- SK-1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

SK-2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

SK-3 Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dan penyuluhan

SK-4 Terpenuhi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Selanjutnya Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

SK-1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 2. Rencana Kerja BBRBLPP TA 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN (Rp. 000)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan	61.146.934.000	61.146.934.000
2	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.218.184.000	3.367.964.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Perikanan Tahun 2025		64.365.118.000	64.514.898.000
Tanggal Pengesahan		02-Dec	21-Apr-25

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dengan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Penetapan kinerja BBRBLPP Tahun 2025 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut merupakan salah satu Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan dukungan

manajemen internal lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan .

2.3. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, BBRBLPP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BBRBLPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan kelautan dan Perikanan.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BBRBLPP pada Tahun 2025 untuk semua SK berjumlah 16 (enam belas) IK. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 16 (enam belas) IK BBRBLPP yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3. Perjanjian Kinerja BBRBLPP TA 2025

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.701
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	368
		4	Nilai PNPB Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0.5520
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	49
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi Dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1
3		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	11

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
	Terselenggarakan Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	9
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	1
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5
		14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IK, terdiri dari *Outcome*, *Output Kendali Rendah*, *Output Kendali Tinggi*, dengan bobot seperti tabel berikut:

Tabel II. 4. Bobot validasi IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. **Validitas Outcome** yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. **Validitas Output Kendali Rendah** yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. **Validitas Output Kendali Tinggi** yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan:

Tabel II. 5. Klasifikasi target indikator kinerja

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel II. 6. Status Capaian Nilai Kinerja

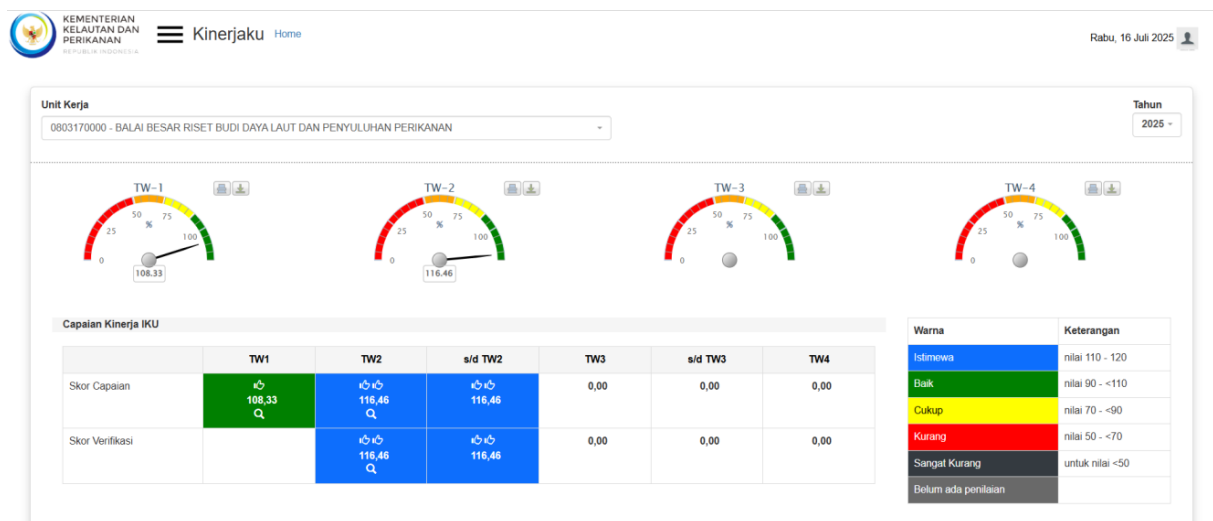
Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) mendapatkan mandat untuk melaksanakan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target 16 (enam belas) Indikator Kinerja (IK). Nilai pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) memiliki kinerja yang **istimewa** (di atas target yang telah ditetapkan). Pencapaian terhadap target kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini walau terdapat Blokir AA terkait kegiatan penyuluhan perikanan dan dukungan manajerial, namun masih dapat melaksanakan kegiatan. Capaian Indikator Kinerja (IK) BBRBLPP pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3. Dashboard Capaian Kinerja BBRBLPP Triwulan II TA. 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran strategis BBRBLPP di akhir Triwulan II TA. 2025, dari 16 IK BBRBLPP terdapat 9 IK yang memiliki target yang harus dicapai pada Triwulan II ini. Dari 9 IK yang harus dicapai targetnya tersebut, 8 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 1 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja.

3.2. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBRBLPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada tahun 2024 dapat tercapai.

3.2.1. Capaian IKU BBRBLPP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBRBLPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja BBRBLPP Tahun 2025 dapat tercapai. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II TA 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi TW II	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.701	1.500	1.800	120,00
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98	10	12	120,00
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	368	100	120	120,00
		4	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0.5520	0,030	0,098	120,00

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi TW II	%
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	49	10	12	120,00
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi Dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1	0	-	-
3	Terselenggarakan Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	11	0	-	-
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	9	0	-	-
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	1	0	-	-
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85	85	85	100,00
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92	70	-	-
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81	0	-	-
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5		-	-
		14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81	70	78,84	111,80
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80	80	100	120,00
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80	0	-	-

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBRBLPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah diidentifikasi agar

sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

3.4. Hasil Pengukuran BBRBLPP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan tahun 2025 dapat tercapai. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi yang dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah serta potensi masalah yang akan mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat rutin, rapat koordinasi dengan pelaksana kegiatan, kunjungan langsung ke lapangan dan penanggung jawab serta pelaksana kegiatan, evaluasi kegiatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

SS1: Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKU 1. : Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun 2024 oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Cara perhitungan IKU adalah Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BBRBLPP. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 3.701 (tiga ribu tujuh ratus satu) kelompok.

Tabel III. 2. Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-1. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2023-2024	Target 2029	% Capaian thd target 2029
4.872	2.553	3.025	2.400	3.701	1.500	1.800	120,00	-25,00	3.701	48,64

Capaian IKU Kelompok pelaku usaha / pelaku pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok) terhadap target tahunannya sebesar 48,64%, dengan capaian 1.800 kelompok dari target tahunan 3.701 kelompok. Jika dibandingkan dengan target triwulan II maka capaian IKU ini sebesar 120% (dari target 1500, capaian sebesar 1800 kelompok). Perbandingan pencapaian IKU ini pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian di tahun ini berkurang sebesar 25%, atau lebih rendah sebesar 600 kelompok yang disuluh. Penurunan ini seiring dengan rencana yang ditetapkan yaitu pencapaian difokuskan pada triwulan 4 (akhir tahun), agar data yang disampaikan sesuai dengan Manual IKU serta meminimalisir kesalahan dalam pelaporan data dukung. Serta dapat segera dilakukan perbaikan jika terjadi perubahan dalam format pelaporan. Jika dibandingkan dengan target jangka panjang tahun 2029, IKU ini sdh mencapai target sebesar 46,20%.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP selama 4 tahun terakhir selalu mengalami perubahan dimana pada tahun 2021 tercapai sebesar 4.872 kelompok, tahun 2022 tercapai sebesar 2.553 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 3.025 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 2400 kelompok.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Pelibatan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal.

2. Setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikut sertakan mitra komunitas.
3. Pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya.
4. Pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan cara lainnya.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satminkal lain lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1.500	1.800	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	500	825	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1.100	1.100	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1.500	1.800	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini di BBRBLPP telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 120%. Dari ketiga satker lainnya yang dibandingkan, BRPBAPPP Maros dan BRPPUPP Palembang telah memiliki capaian 120%, sedangkan BRPBATPP Bogor, memiliki capaian sebesar 100%.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Pelibatan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal.
2. Setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikut sertakan mitra komunitas.
3. Pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya.
4. Pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan cara lainnya.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah telah dilakukannya kegiatan penyuluhan oleh penyuluh perikanan Satminkal BBRBLPP seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi /teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan, karena kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini tidak mendapatkan porsi anggaran, jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini tidak bisa dihitung dikarenakan tidak terdapat realisasi anggaran yang diakibatkan dari kebijakan efisiensi.

IKU 2. : Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP

IKU ini merupakan jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 98 (Sembilan puluh delapan) kelompok.

Cara penghitungan IKU ini adalah hitung jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tabel III. 4. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025

IKU-2. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2023-2024	Target 2029	% Capaian thd target 2025
0	23	20	10	98	10	12	120,00	20,00	102	11,76

Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BBRBLPP (Kelompok) terhadap target tahunan sudah tercapai sebesar 12,24%, dengan jumlah capaian sebesar 12 kelompok dari target sebesar 98 kelompok. Jika dibandingkan dengan target triwulan II maka capaiannya sebesar 120% atau dari target 10 kelompok, tercapai 12 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada tahun sebelumnya, capaian IKU ini mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun lalu. Jika dibandingkan dengan target jangka panjang di tahun 2029 menunjukkan pencapaian sebesar 11,76%.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya Triwulan II Tahun 20245 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	2	3	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120

Dari tabel di atas menunjukan bahwa IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP sudah tercapai bahkan melebihi target triwulanannya yaitu sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan Satminkal lain, maka rata-rata capaian 4 (empat) satminkal sebesar 120%.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Perikanan yang dilakukan melalui:
 - a. Perbaikan internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring; dan
 - b. Fasilitasi pembiayaan untuk operasional penyuluhan.
2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui progam pemberdayaan yaitu:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pengembangan Modal;
 - c. Pengembangan Usaha; dan
 - d. Pengembangan Kelembagaan Usaha.

Proses penilaian kelas kelompok ini dimulai dari SK Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat, membutuhkan proses waktu yang lama disebabkan melibatkan banyak pihak. SK Penetapannya belum keluar disebabkan masih adanya verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah. Penggantian PPB di kabupaten kota sehingga Penyuluh Perikanan Bantu masih dalam proses pengenalan kelompok.

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, dan koordinasi ini telah terbangun dengan baik sehingga IKU ini dijadwalkan akan tercapai sesuai target pada Triwulan III.

Anggaran yang mendukung IKK ini sudah tergabung dalam IKU 1 yaitu RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan (Penyusunan materi penyuluhan berbasis online (*cyber extention*); Pendampingan kepada kelompok masyarakat KP; Penyusunan profil kelompok berbasis online; dan Koordinasi Penyuluhan KP) dengan anggaran sebesar Rp3.356.964.000 dan telah terealisasi sebesar Rp2.299.958.581 (68,51%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II yang sudah tercapai sebesar 120%. Maka efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini sebesar 51,49%.

IKU 3: Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (kelompok)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok

berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kelompok.

Cara perhitungan IKU ini adalah Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tabel III. 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-3. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP											
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2023-2024	Target 2029	% Capaian thd target 2025	
178	255	178	90	368	100	120	120,00	33,33	377	31,83	

Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satker BBRBLPP terhadap target tahunannya sebesar 32,61%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II, dapat dikatakan bahwa pencapaian triwulan ini sudah melebihi target triwulan II yaitu sebesar 120%, dengan capaian sebesar 120 kelompok dari target 100 kelompok. Perbandingan pencapaian IKU ini pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan pula bahwa pencapaian di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 33,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029, IKU ini sudah mencapai target sebesar sebesar 31,83%.

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	50	70	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	150	180	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP dan 3 (tiga) satminkal lainnya yaitu BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang dan BRPBATPP Bogor memiliki capaian maksimal yaitu 120%.

Hal yang perlu dilakukan adalah untuk bisa mencapai target indikator ini adalah dengan meningkatkan kinerja penyuluh dengan sebaik baiknya dan melakukan pemantauan serta pengawalan dalam mengejar capaian setiap triwulan bahkan tahunannya.

Faktor yang mendukung keberhasilan IKU ini adalah :

1. Melakukan komunikasi dan sosialisasi intensif dengan masyarakat kelautan dan perikanan yang belum tergabung dalam kelompok tentang kelembagaan kelompok KP.
2. Melakukan pendataan sumber daya alam yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
3. Melakukan pendataan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Secara budaya, perekonomian dan interaksi sosial masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal dan informal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah pendampingan kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah medapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Anggaran yang mendukung IKK ini sudah tergabung dalam IKU 1 yaitu RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan (Penyusunan materi penyuluhan berbasis online (*cyber extention*); Pendampingan kepada kelompok masyarakat KP; Penyusunan profil kelompok berbasis online; dan Koordinasi Penyuluhan KP) dengan tidak mendapatkan porsi anggaran akibat

dari efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini tidak bisa dihitung dikarenakan tidak terdapat realisasi anggaran yang diakibatkan dari kebijakan efisiensi anggaran.

IKU 4.: Nilai PNBP Satker BBRBLPP

Indikator Kinerja ini merupakan :

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target **0,5520 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah)**. Cara perhitungan IKU ini adalah dengan menjumlahkan Nilai PNBP SDA dengan Nilai PNBP Lainnya.

Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP lainnya.

Tabel III. 8. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-4. Nilai PNBP Satker BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2023-2024	Target 2029	% Capaian thd target 2025
0	0	0,456	0,403	0,552	0,030	0,098	120,00	-75,68	0,556	17,63

Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satker BBRBLPP terhadap target tahunannya sebesar 32,61%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II, dapat dikatakan bahwa pencapaian triwulan ini sudah melebihi target triwulan II yaitu sebesar 120%. Perbandingan pencapaian IKU ini pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan pula bahwa pencapaian di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 33,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029, IKU ini sudah mencapai target sebesar sebesar 31,83%.

Perubahan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebanyak 178 kelompok, 2022 tercapai sebesar 255 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 178 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 90 kelompok.

Capaian IKU Nilai PNBP BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 9. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP dengan Satminkal Lain Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0,4	0,43	107,5
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0,01	0,03	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0,02	0,05	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0,030	0,098	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Nilai PNBP satker BBRBLPP dan 2 (dua) satker lain yaitu BRPPUPP Palembang dan BRPBATPP Bogor sudah mencapai target bahkan

jauh melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian keseluruhan sebesar 120%. Sedangkan BRPBAPP Maros sudah tercapai sebesar 107,5%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah terkelolanya dengan baik pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya yang dikelola dan dilaporkan.

Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Juta) ini sebagian besar berasal dari kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) dimana kegiatan SFV ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan BMN untuk usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan di 3 lokasi yaitu: 1. Lokasi Kantor Utama di Desa Penyabangan, 2. Lokasi Instalasi Karamba Jaring Apung (KJA) di Desa Sumberkima, dan 3. Lokasi Instalasi Tambak di Desa Pejarakan dan juga dari sewa aset.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO yang sama dengan IKU 1, 2 dan 3 (Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP) dengan anggaran sebesar Rp10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp3.850.000 (38,50%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini 81,50%.

IKU 5: Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP Nomor 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 49 (empat puluh sembilan) unit.

Cara perhitungan IKU ini adalah hitung Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan.

Tabel III. 10. Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-5. Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP											
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
0	0	0	0	49	10	12	120,00	0	69	17,39	

Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) terhadap target tahunan baru terpenuhi sebesar 17,75%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 0,030 rupiah milyar maka capaiannya sebesar 326,67%, namun karena pada aplikasi kinerja yang merupakan aplikasi pengukur kinerja lingkup KKP, nilai toleransi maksimal adalah 120,00% maka persentase capaiannya adalah 120,00%. capaian IKU yang sama pada tahun sebelumnya, maka capaian IKU ini terjadi penurunan sebesar 75,68%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi/ blokir anggaran sehingga kegiatan smart fisheries village (SFV) yang menyumbangkan PNBP terbanyak tidak bisa berjalan optimal. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, IKU ini tercapai sebesar 17,63%.

Perubahan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebanyak 178 kelompok, 2022 tercapai sebesar 255 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 178 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 90 kelompok. Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Perikanan yang dilakukan melalui:
 - a. Perbaikan internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring; dan
 - b. Fasilitasi pembiayaan untuk operasional penyuluhan.
2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui progam pemberdayaan yaitu:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pengembangan Modal;
 - c. Pengembangan Usaha; dan
 - d. Pengembangan Kelembagaan Usaha.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah telah dilakukannya kegiatan penyuluhan oleh penyuluh perikanan Satminkal BBRBLPP

seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 11. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	7	8	114,29
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	20	24	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP telah mencapai target yang telah ditentukan. Dari 4 (empat) satminkal yang dibandingkan, 3 (tiga) satminkal yaitu BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor dan BBRBLPP Gondol sudah mencapai nilai maksimal yaitu 120%, sedangkan 1 (satu) satminkal yaitu BRPPUPP memiliki capaian di bawah 114,29%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO yang sama dengan IKU 1, 2, 3 dan 4 (Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP) dengan tidak mendapatkan porsi anggaran akibat dari efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di triwulan II maka efisiensi anggaran tidak dapat dihitung.

SS2.: Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

IKU 6.: Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha Di Satker BBRBLPP (Paket)

IKU ini merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh BBRBLPP yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ditetapkan dengan target 1 (satu) paket.

Cara perhitungan IKU ini adalah **hitung jumlah materi dan/atau Metode Penyuluhan yang Ditetapkan**.

Tabel III. 12. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-6. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00

Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP di triwulan II belum ada target maupun capaian karena periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indikator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV). Progres IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP hingga triwulan II, sudah terkumpul 10 (sepuluh) materi dengan judul sebagai berikut:

1. Budidaya Bandeng
2. Bulan Cinta Laut
3. Cara Pembesaran Ikan yang Baik
4. Sertifikat Penerapan Progam Manajemen Mutu Terpadu HACCP
5. Lampu Celup Dalam Air (Lacuda)
6. Pembenihan dan pendederan kerapu cantang
7. Pembenihan Ikan Lele
8. Pemeliharaan Induk Bandeng
9. Pendederan dan Pembenihan Kakap
10. Pengembangan Kelembagaan

Hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah mempertahankan kinerja yang baik bagi penyuluh dalam penyusunan media penyuluhan yang bisa diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat serta merealisasikan output capaian tahunannya.

Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 13. Perbandingan Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP (paket) Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP, BBRBLPP dan Satminkal lain masih belum terdapat target maupun capaian di triwulan II tahun 2025 karena IKU ini direncanakan akan tercapai di akhir tahun atau triwulan IV.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ini adalah pemahaman mendalam terhadap kebutuhan sasaran, pemilihan media yang tepat, penyampaian pesan yang relevan, partisipasi aktif pelaku usaha, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini meliputi identifikasi kebutuhan pelaku usaha, pengembangan materi penyuluhan yang relevan, pemilihan media yang tepat, dan evaluasi dampak kegiatan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Fasilitas Kelompok dengan tidak mendapatkan porsi anggaran dan hingga triwulan II ini tidak terdapat realisasi. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada capaian IKU. Maka efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini juga belum bisa dihitung.

SS3.: Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKU 7.: Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) ditetapkan dengan target 11 (sebelas) orang.

Cara perhitungan indikator ini adalah Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP.

Tabel III. 14. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025- 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024- 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0,00

Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) terhadap target tahunan maupun triwulannya belum bisa dibandingkan karena belum ada target maupun capaian dikarenakan periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indikator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV).

Progress IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang), sudah pada tahap selesai ujian dan menunggu hasil berdasarkan surat B.2741/SJ.3/KP.220/VI/2025 jumlah penyuluh yang diajukan sebanyak 13 orang dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Abdul Malik, S.Pi
2. Grens Eka Wati Ga, S.Pi
3. Hasinta Rambu Roku, S.Pi
4. Robertus Imanuel Betty, S.Pi
5. Bunyamin, S.St.Pi.,M.Tr.Pi
6. Neltie Diare, S.Pi
7. Mustawan, S.Pi
8. Muhammad Supianor, S.Pi
9. Andrias Raja
10. Hendy
11. Ilhamsyah
12. Sudarmaji
13. Muhamad Taufik Hidayat

Jumlah yang bisa mengikuti ujian sebanyak 8 orang sisanya tidak bisa mengikuti ujian karena terkendala di Pendidikan.

Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 15. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP, BBRBLPP dan Satminkal lain masih belum terdapat target maupun capaian di triwulan II tahun 2025 karena IKU ini direncanakan akan tercapai di akhir tahun atau triwulan IV.

Faktor-faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah penyuluh perikanan yang lulus Uji Kompetensi meliputi: dukungan pemerintah, peningkatan kualitas SDM penyuluh, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar pihak terkait.

Elaborasi:

1. Dukungan Pemerintah:

Kebijakan dan regulasi yang mendukung uji kompetensi, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan dan uji kompetensi, serta insentif bagi penyuluh yang lulus, sangat penting.

2. Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh:

Pelatihan yang berkualitas, pengembangan kompetensi, dan akses terhadap informasi dan teknologi terbaru akan meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pemanfaatan Teknologi:

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyuluhan, seperti aplikasi mobile, platform daring, dan media sosial, akan mempermudah penyampaian informasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

4. Kolaborasi Antar Pihak Terkait:

Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku usaha perikanan akan memperkuat upaya peningkatan kompetensi penyuluh.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, peningkatan kualitas SDM penyuluh, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi yang efektif, maka IKU jumlah penyuluh perikanan yang lulus Uji Kompetensi dapat tercapai dengan baik.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini adalah telah diusulkannya 11 orang tenaga penyuluh perikanan yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi, pengusulan ini diajukan ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO penyuluhan perikanan yang bersertifikat kompetensi dengan anggaran sebesar Rp11.000.000 dan hingga triwulan II ini belum terdapat realisasi anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada capaian IKU. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini juga belum bisa dihitung.

IKU 8.: Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)

IKU ini merupakan (1) indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku; (2) Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 9 (sembilan) orang. Cara perhitungan IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis dengan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

Tabel III. 16. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-8. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0,00

Capaian IKU jumlah penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan (Orang) jika dibandingkan dengan target tahunan maupun triwulannya belum bisa dibandingkan karena belum ada target maupun capaian dikarenakan periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indicator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV).

Progres hingga triwulan ini sudah terdapat 9 (Sembilan) orang yang lulus pelatihan teknis, namun masih ada penyuluh yang belum mengumpulkan sertifikat pelatihan teknis, sehingga diharapkan capaian indicator ini bisa melebihi dari target yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah pengetahuan penyuluh yang mumpuni, keterampilan praktis, kemampuan berkomunikasi yang baik, semangat kerja yang tinggi, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari pemerintah/ lembaga terkait.

Capaian IKU jumlah penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 17. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU jumlah penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) dan Satminkal lain masih belum terdapat target maupun capaian di triwulan I tahun 2025 karena IKU ini direncanakan akan tercapai di akhir tahun atau triwulan IV.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah pengetahuan penyuluh yang kuat, keterampilan praktis, kemampuan berkomunikasi yang baik, semangat kerja yang tinggi, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari pemerintah/ lembaga terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang baru lulus pelatihan akan fokus pada kegiatan lapangan, seperti memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat nelayan, kelompok perikanan, dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, mereka juga akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program penyuluhan yang telah dilaksanakan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO penyuluhan perikanan yang bersertifikat kompetensi dengan tidak terdapat porsi anggaran dan tidak terdapat realisasi anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada capaian IKU. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini juga belum bisa dihitung.

SS3. : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKU.9 : Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)

IKU ini merupakan jumlah dokumen kerja sama BBRBLPP antar lembaga yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2025 ini BBRBLPP memiliki target kemitraan yang disepakati sebanyak 1 (satu) kemitraan. Cara penghitungan IKU ini adalah jumlah Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerjasama lingkup antar lembaga dan disepakati BBRBLPP bersama para pihak kerja sama. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati BBRBLPP tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 18. Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-9. Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00

Capaian IKU kemitraan yang disepakati dan/ atau ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan target tahunan maupun triwulannya belum bisa dibandingkan karena belum ada target maupun capaian dikarenakan periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indicator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV). Progres indicator ini sudah berjalan 2 kerjasama terkait dengan kegiatan smart fisheries village (SFV) dan pemanfaatan asset.

Cara perhitungan capaian IKU ini adalah hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerjasama lingkup antar lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bersama para pihak kerja sama.

Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) jika dibandingkan dengan satker lingkup Pusluh KP yang memiliki indikator yang sama maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 19. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/ atau ditindaklanjuti BBRBLPP pada triwulan II tahun 2025

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian IKU kemitraan yang disepakati dan ditindaklanjuti terhadap target triwulanannya pada 4 (empat) satminkal yang dibandingkan, maka pada keempat satker tersebut belum terdapat target maupun capaiannya, hal ini disebabkan karena targetnya akan terealisasi di akhir tahun.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya hubungan yang baik antara BBRBLPP dengan pihak yang melakukan kerjasama sehingga kerjasama yang dilakukan dapat terlaksana, selain itu perlu pendampingan dari pusat terutama untuk tata kelola kerjasama yang baik. Hal lain yang mendukung IKU ini adalah adanya dukungan administrasi yang baik dari pusat terkait dengan penandatanganan dokumen Kerjasama jika diperlukan, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang IKU ini adalah segera menindaklanjuti dokumen-dokumen perjanjian kerjasama dan melakukan pemantauan dan pengawalan kegiatan kerjasama dalam merealisasikan output capaian tahunannya. Selain itu perlu juga di inisiasi kerjasama-kerjasama yang dinilai strategis yang dapat mendukung BBRBLPP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,- dan hingga triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp5.950.000,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada capaian IKU. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini juga belum bisa dihitung.

IKU 10.: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP

IKU ini merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan capaian IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit eselon II, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II}} \times 100$$

Berikut Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP pada Triwulan II tahun 2025:

Tabel III. 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	50	100	85	85	85	100	0,00	85	117,65

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%) jika dibandingkan dengan target tahunan dan triwulan II maka capaian IKU ini adalah 117,65%, dari target triwulan II sebesar 85, tercapai sebesar 100 atau sebesar 117,65%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya maka capaian di tahun ini tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, karena memiliki capaian yang sama yaitu 100. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka capaian indikator ini adalah 117,65%.

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam penilaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP triwulan II tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Penyuluhan KP. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP satker lingkup Pusluh KP pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 21. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP, dimana BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros memiliki capaian yang sama yaitu 100%, sedangkan BRPPUPP Palembang dan BRPBATPP Bogor memiliki capaian 117,65%, hal ini dikarenakan seluruh rekomendasi itjen yang masuk pada aplikasi SIDAK sudah di tindaklanjuti dan statusnya **Tuntas**.

Hal yang perlu dilakukan untuk tercapainya IKU ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2025 (Triwulan II Tahun 2025).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah respon cepat BBRBLPP dalam hal rekomendasi hasil pengawasan Itjen. Hal tersebut didukung oleh tim yang handal dan SDM yang bekerja dengan baik sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tindak lanjut dengan lebih efisien dan cepat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi hasil

pengawasan Itjen yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp8.815.902.000,- dan hingga triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp2.265.670.168,-(25,70), jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II sebesar 100%. Maka nilai efisiensi di triwulan IO tahun 2025 ini sebesar 74,30%.

IKU 11.: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)

IKU ini merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Cara penghitungan IKU ini mengacu pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP yang terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Pada tahun 2023 ini BBRBLPP memiliki target Nilai IKPA BBRBLPP sebesar 89 (delapan puluh sembilan) nilai. Cara perhitungan capaian IKU ini dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBRBLPP tersaji pada tabel berikut.

Tabel III. 22. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP pada Triwulan II tahun 2025

IKU-10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
81,17	94,03	94,18	99,42	92	84	99,96	119,00	0,54	92	108,65

Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) di triwulan II sudah tercapai sebesar 119% dengan capaian nilai 99,96, jika dibandingkan dengan target tahunan sudah tercapai sebesar 108,65%. Jika dibandingkan dengan capaian ditriwulan yang sama pada tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 0,54%, dimana pada triwulan II tahun 2024 capaian IKU IKPA ini adalah 99,42. Jikan dibandingkan dengan target jangka menengah telah tercapai sebesar 108,65%.

Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Pusluh KP, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP lingkup Pusluh KP pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 23. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	84	99,85	118,87
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	84	119,05	119,05
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	84	97,79	116,42
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	84	99,96	119,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk setiap satker sudah melebihi target status capaian istimewa, yaitu persentase di atas 100%.

Faktor pendukung tercapainya IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP adalah koordinasi yang baik antara Kepala BBRBLPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Perencana Keuangan, Tim Pengelola Keuangan termasuk operator dan stakeholder dalam hal ini adalah KPPN Pratama.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp51.886.934.000,- dan hingga triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp30.923.626.885,- (59,60). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II dengan capaian 119%, maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini sebesar 59,40%.

IKU 12.: Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP

Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Cara perhitungan Nilai PM SAKIP BBRBLPP adalah Penilaian Mandiri SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon II yaitu:

Tabel III. 24. Kategori Nilai PM SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Capaian IKU Nilai PM SAKIP BBRBLPP tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 25. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-10. Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0,00

Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai) di triwulan II belum ada target maupun capaian karena periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indicator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV). Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPSDM sudah dilaksanakan pada tanggal 2-5 Juni 2025 dan sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar pencapaian target tahunannya adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam Penilaian Mandiri SAKIP Triwulan II tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya yang sejenis dan memiliki tisi yang sama, dalam hal ini dibandingkan dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan dan Penyuluhan Perikanan. Berikut adalah perbandingan capaian IKU dimaksud:

**Tabel III. 26. Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP
pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain**

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP belum mencapai target yang ditetapkan, begitu pula 3 (tiga) satker lain masih belum ada target maupun capaian. Hal ini dikarenakan IKU ini akan tercapai pada triwulan III atau IV.

Pemantauan IKU Nilai PM SAKIP BBRBLPP berdasarkan 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Namun demikian, peran seluruh pegawai lingkup BBRBLPP menjadi salah satu faktor keberhasilan pencapaian target mengingat beberapa persyaratan dokumen PM SAKIP ini merupakan data dukung yang setiap bulan dilaporkan dan di upload oleh seluruh pegawai pada e-kinerja BKN.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp18.200.000,- dan hingga triwulan II ini belum ada realisasi sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada realisasi. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini belum bisa dihitung.

IKU 13.: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)

IKU ini merupakan Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai

Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula perhitungan NKPA BBRBLPP menggunakan formula sebagai berikut :

A. Efektivitas

1. Capaian RO

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker RVRO_i : Realisasi Volume RO i TVRO_i : Target
Volume RO i

n : Jumlah RO

B. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK⁷⁹: Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBK_i : Indeks
Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{SBK} \times W_{\text{Penggunaan}_{SBK}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{NE}_{\text{Alokasi}}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja

Satker CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

Cara penghitungan IKU ini mengacu pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP yang terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN.

Tabel III. 27. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	71,5	0	0	0	0	71,5	0,00

Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) di triwulan II belum ada target maupun capaian karena periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indicator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV). Progres di triwulan II ini sudah dilakukan penginputan target dan realisasi pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen setiap bulannya dengan mengacu pada RKAKL dan data realisasi anggaran yang bersumber dari aplikasi SMART DJA.

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam Penilaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Triwulan II tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya yang sejenis dan memiliki tusi yang sama, dalam hal ini dibandingkan dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan dan Penyuluhan Perikanan. Berikut adalah perbandingan capaian IKU dimaksud:

Tabel III. 28. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP belum mencapai target yang ditetapkan, begitu pula 3 (tiga) satker lain masih belum ada target maupun capaian. Hal ini dikarenakan IKU ini akan tercapai pada akhir tahun (triwulan IV). Faktor pendukung tercapainya IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP ini adalah pemahaman yang mumpuni terhadap KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan juga PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja kementerian Negara/ Lembaga, oleh kepala satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim perencana, pengelola keuangan serta operator. Disamping itu faktor pendukung lain adalah koordinasi yang baik pihak-pihak terkait dalam pencapaian IKU ini.

Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah ketepatan dan efisiensi dalam penginputan data realisasi anggaran maupun fisik kegiatan kedalam aplikasi SAKTI Modul Komitmen setiap bulannya dengan mengacu pada RKAKL dan data realisasi anggaran yang bersumber dari aplikasi SMART DJA.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp18.200.000,- dan hingga triwulan II ini belum ada realisasi sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada realisasi. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini belum bisa dihitung.

IKU 14.: Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP

Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Cara perhitungan Indikator ini adalah:

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Tabel III. 29. Indikator Riwayat Pendidikan Formal Terakhir yang Telah Dicapai

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Tabel III. 30. Riwayat Pengembangan Kompetensi

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel III. 31. Indikator Penilaian Prestasi Kerja PNS

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel III. 32. Indikator Riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev\ 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev\ 1 = IPASN\ Pejabat\ Lev\ 1 + \text{Rerata Nilai } IPLev\ 2$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Tabel III. 33. Kategori Penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Tabel III. 34. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-13. Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (indeks)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
59	59,26	73,25	82,73	81	70	78,84	112,63	-4,70	84	93,86

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (%) sudah tercapai sebesar 78,84 dari target 70 atau sama dengan 112,63%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, sudah tercapai sebesar 97,33%. Jika dibandingkan dengan capaian di triwulan yang sama tahun sebelumnya maka terdapat penurunan capaian sebesar -4,70% dimana pada tahun sebelumnya capaian IKU ini sebesar 82,73. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian triwulan II ini sudah tercapai sebesar 93,86%.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar pencapaian target tahunannya adalah mempertahankan kinerja ASN yang baik dan meningkatkan kinerja ASN yang masih kurang dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimtek, diklat 20JP maupun kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja ASN di lingkup BBRBLPP.

Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Puriskan, BBRBLPP dan 3 (tiga) satker lainnya masih belum ada target maupun capaian. Capaian nilai indeks profesionalisme satker lingkup Puriskan triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 35. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusluh KP pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	70	79,17	113,1
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	70	79,13	113,04
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	72	78,01	108,35
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	70	78,84	112,63

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk satker BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang dan BBRBLPP Gondol sudah melebihi target dengan status capaian istimewa, yaitu persentase di atas 110%, sedangkan BRPBATPP Bogor sudah tercapai 106,35%

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah meningkatnya kompetensi setiap pegawai, hal tersebut dapat dilihat pada link ropeg.kkp.go.id pada opsi IP ASN. Kenaikan capaian IKU ini dipengaruhi oleh update data dari setiap pegawai, dan data yang dimaksud adalah terkait peningkatan kompetensi pegawai baik yang mengikuti seminar, bimtek, diklat dan sejenisnya. Baik sebagai pemateri maupun sebagai peserta. Dan pada triwulan II tahun 2025 BBRBLPP sudah mencapai targetnya atas partisipasi dari seluruh pegawai dengan terinputnya data seminar, bimtek, dan diklat yang telah diikuti pada tahun 2025.

Pemantauan kinerja ASN berdasarkan 4 (empat) sumber data IKU yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu faktor yang mendukung pencapaian target IKU. Namun demikian, distribusi ASN, khususnya penyuluh perikanan menjadi salah satu katalisator keberhasilan pencapaian target mengingat beberapa pelaporan seperti SKP online membutuhkan koneksi internet selain itu, pengiriman dokumen penunjang seperti presensi harus menunggu pengesahan dari dinas sebelum dikirimkan ke BBRBLPP. Sedangkan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kinerja ASN lingkup BBRBLPP baik pada jabatan struktural, manajerial maupun fungsional.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp14.000.000,- dan hingga triwulan II ini belum ada realisasi sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan I belum ada realisasi. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini belum bisa dihitung.

IKU 15.: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel III. 36. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)											
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
0	0	0	0	80	80	100	125,00	0	80	125,00	

Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) jika dibandingkan dengan target tahunan, maka tercapai sebesar 125%, namun batas maksimal nilai pada aplikasi kinerjaku yang merupakan dasar perhitungan kinerja adalah 120%, maka capaiannya adalah 120%, begitu juga jika dibandingkan dengan target triwulan II, maka capaiannya adalah 120%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun sebelumnya, maka tidak dapat dibandingkan, karena indikator ini baru ada pada tahun 2025 ini. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP baru menjadi target indikator kinerja BBRBLPP pada akhir tahun 2024 dengan capaian

sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak terdapat capaian, karena belum menjadi target indikator BBRBLPP.

Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP ini dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusluh KP.

Tabel III. 37. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)
Lingkup Pusluh KP pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	85	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 4 (empat) satker yang dibandingkan, maka 3 (tiga) satker yaitu BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang, dan BRPBATPP Bogor, telah mencapai 120%, sedangkan BBRBLPP Gondol telah mencapai 100% berdasarkan surat dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 tertanggal 9 Juli 2025 dan Surat dari Sekretaris BPPSDM, perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2025 tertanggal 15 Juli 2025.

Faktor-faktor pendukung IKU ini meliputi perencanaan yang tepat, pemahaman PPK dan admin, serta pemanfaatan teknologi informasi. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ini meliputi :

1. Perencanaan Pengadaan:

- Identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- Penetapan jenis barang/jasa.
- Penetapan cara pengadaan.
- Pemaketan.
- Konsolidasi.
- Waktu pemanfaatan barang/jasa.

- Anggaran pengadaan.

2. Penyiapan Rencana Umum Pengadaan (RUP):

- RUP merupakan output dari perencanaan pengadaan.
- RUP dituangkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

3. Pengumuman RUP melalui SIRUP:

- PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan pengumuman RUP melalui SIRUP.
- Pengumuman ini dapat diakses oleh masyarakat luas.
- SiRUP mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp145.394.000,- dan hingga triwulan II ini sudah terealisasi sebesar Rp98.467.400,- (67,72%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II telah tercapai sebesar 120%. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini sebesar 52,28%.

IKU 16.: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)

IKU ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara perhitungan Iku ini adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 38. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) pada Triwulan II Tahun 2025

IKU-16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renja BBRBLPP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0,00

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) di triwulan II belum ada target maupun capaian karena periode perhitungannya adalah tahunan, sehingga capaian indicator ini akan ada di akhir tahun (triwulan IV). Progress di triwulan II untuk indicator ini sudah pada tahap melengkapi dokumen-dokumen untuk penilaian Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di BBRBLPP dan diharapkan telah rampung pada akhir tahun (triwulan IV) Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Pusluh, BBRBLPP dan 3 (tiga) satker lainnya masih belum ada target maupun capaian. Capaian Nilai Kinerja Anggaran satker lingkup Puriskan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 39. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) pada Triwulan II Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) belum memiliki target dan capaian di triwulan II, begitu pula 3 (tiga) satker lain belum memiliki target dan capaian. Hal ini dikarenakan IKU ini akan terealisasi pada akhir tahun atau pada triwulan IV.

Faktor pendukung utama yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) antara lain: kepemimpinan dan komitmen pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan program yang terstruktur, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini meliputi perencanaan dan penganggaran BMN, penyusunan rencana kebutuhan BMN, pelaksanaan opname fisik barang persediaan, pelaporan BMN, serta kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp218.304.000,- dan hingga triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp100.695.550,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di triwulan II belum ada realisasi. Maka nilai efisiensi di triwulan II tahun 2025 ini belum bisa dihitung.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

3.4.1. Capaian Realisasi Anggaran

Kegiatan manajerial dan penyuluhan di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol tahun 2025 memperoleh dana dari sumber anggaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada awal tahun 2025 BBRBLPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp64.365.118.000. Hingga akhir triwulan II tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada 21 Februari 2025 yaitu terkait blokir perjalanan dinas luar kota dan dalam kota sejumlah Rp. 63.197.000,-, dimana total pagu tetap yaitu sebesar Rp64.365.118.000. Revisi kedua pada 20 Maret 2025 terkait Perubahan digital stamp dan Blokir belanja bahan sejumlah Rp. 7.244.883.000,-, dengan total pagu masih sama yaitu sebesar Rp64.365.118.000. Revisi ketiga tanggal 9 April 2025 terkait Pergeseran/Penambahan/ Relaksasi blokir belanja bahan menjadi belanja honor pegawai PJLP, Outsourcing dan PPB berdasarkan arahan sekretariat badan, dengan total pagu terdapat penambahan sebesar Rp149.780.000, sehingga total pagu bertambah menjadi Rp64.514.898.000. Revisi keempat tanggal 21 April 2025 terkait Pemutakhiran halaman III DIPA dan pergeseran POK, dengan jumlah pagu masi sama yaitu sebesar Rp 64.514.898.000,-. Penyerapan anggaran BBRBLPP per Sasaran Kegiatan per 30 Juni 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel III. 40. Tabel realisasi anggaran triwulan II TA 2025 per Sasaran Kegiatan

	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.366.964.000	2.303.808.581	68,42
2.	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	-	-	-
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	11.000.000	-	-
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	61.136.934.000	33.394.210.003	54, 62
Jumlah Total Anggaran :		64.514.898.000	35.698.018.584	55,33

Sehubungan dengan pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BBRBLPP, data terkait kegiatan pendukung IKU dalam RKAKL disajikan sebagai berikut :

**Tabel III. 41. Pagu dan Realisasi Anggaran Pendukung IKU Lingkup BBRBLPP
Triwulan II Tahun 2025**

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	-	kebijakan efisiensi	
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.356.964.000	2.299.958.581	68,51
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	-	kebijakan efisiensi	
		4	Nilai PNPB Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	10.000.000	3.850.000	38,50
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	-	kebijakan efisiensi	
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi Dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	-	-	-
3	Terselenggarakan Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	11.000.000	kebijakan efisiensi	
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	-	kebijakan efisiensi	



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	20.000.000	5.950.000	29,75
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	8.815.902.000	2.265.670.168	25,70
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	51.886.934.000	30.923.626.885	59,60
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	18.200.000	kebijakan efisiensi	-
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	18.200.000	kebijakan efisiensi	-
		14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	14.000.000	kebijakan efisiensi	-
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	145.394.000	98.467.400	67,72
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	218.304.000	10.695.550	46,13

3.4. Efisiensi Sumber Daya BBRBLPP

Dalam rangka penghitungan efisiensi berikut disajikan tabel perhitungan Efisiensi Anggaran BBRBLPP Triwulan II TA 2025

Tabel III. 42. Perhitungan Efisiensi Anggaran BBRBLPP Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN PENDUKUNG (KRO)	Anggaran Per indikator Kinerja			Volume Per indikator Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			3.366.964.000	2.303.808.581	68,42				
1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	-	kebijakan efisiensi	-	1.500,00	1.800,00	120,00	-
2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)		3.356.964.000	2.299.958.581	68,51	10	12	120,00	51,49
3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)		0	kebijakan efisiensi	-	100	120	120,00	-
4	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)		10.000.000	3.850.000	38,50	0,030	0,098	326,67	288,17
5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)		0	kebijakan efisiensi	-	10	12	120,00	-



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN PENDUKUNG (KRO)	Anggaran Per indikator Kinerja			Volume Per indikator Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			-	-	-	-	-	-	-
6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	Fasilitasi Kelompok	0	-	-	-	-	-	-
3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			11.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	Penyuluhan perikanan yang bersertifikat kompetensi	11.000.000	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)		-	-	-	-	-	-	
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan			61.136.934.000	33.394.410.003	54,62				
9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindakanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	Layanan Dukungan Manajemen Satker	20.000.000	5.950.000	29,75	-	-	-	-
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)		8.815.902.000	2.265.670.168	25,70	85	85	100	74,30
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)		51.886.934.000	30.923.626.885	59,60	84	99,96	119,00	59,40
12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)		18.200.000	kebijakan efisiensi	-	-	-	-	-
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)		18.200.000	kebijakan efisiensi	-	-	-	-	-



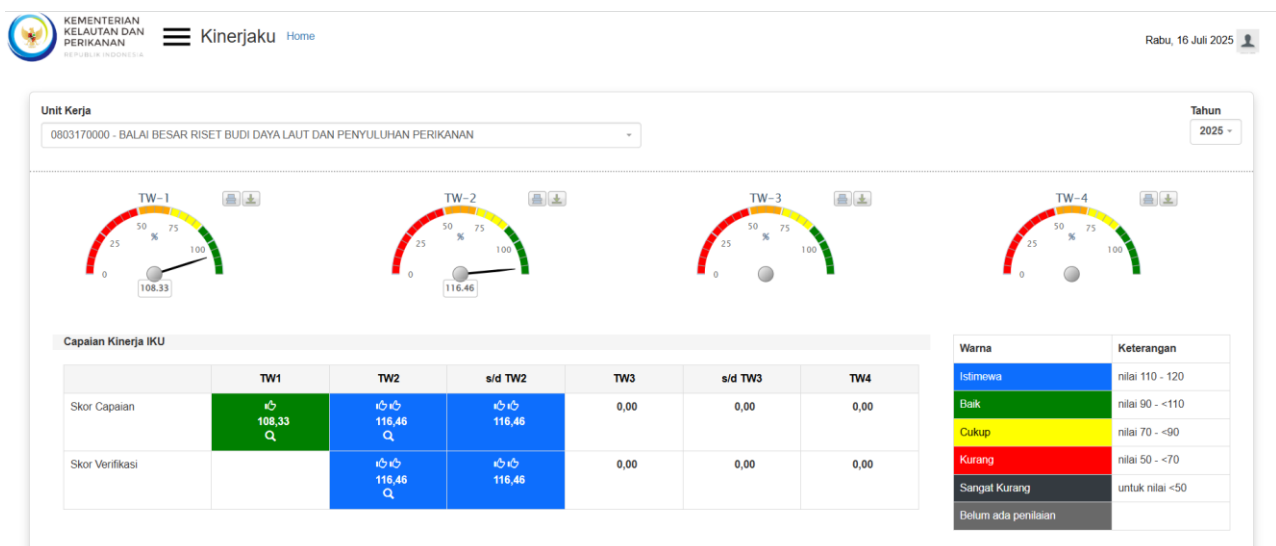
BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN PENDUKUNG (KRO)	Anggaran Per indikator Kinerja			Volume Per indikator Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		14.000.000	kebijakan efisiensi	-	70	78,84	112,63	-
15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)		145.394.000	98.467.400	67,72	80	100	120	52,28
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)		218.304.000	100.695.550	46,13	-	-	-	-
			64.514.898.000	35.698.218.584	55,33			116,46	61,13

Bab IV. Penutup

Pada triwulan II tahun 2025, BBRBLPP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 4 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Utama. Selama triwulan II tahun 2025, dari 16 IKU BBRBLPP terdapat 9 IK yang memiliki target yang harus dicapai pada Triwulan II ini. Dari 9 IK yang harus dicapai targetnya tersebut, 8 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 1 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja, untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja BBRBLPP triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRBLPP di tingkat korporat triwulan II tahun 2025 sebesar 116,46%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Selama triwulan II T.A. 2025, dari 9 IK yang tercapai targetnya tersebut, 8 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 1 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja, untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi dari 9 IKU tersebut adalah:

10. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 1.500 kelompok, tercapai 1.800 kelompok;
11. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 10 kelompok, tercapai 12 kelompok;
12. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok) dengan target triwulan II sebanyak 100 kelompok, tercapai sebanyak 120 kelompok;
13. Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) dengan target triwulan II sebesar 0,030 Rupiah Milyar, tercapai sebanyak 0,98 Rupiah Milyar;
14. Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit) dengan target triwulan II sebesar 10 unit, tercapai sebanyak 12 unit;
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%) dengan target triwulan II sebesar 85, tercapai sebesar 85;
16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) dengan target triwulan II sebesar 84, tercapai sebesar 99,96;
17. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) dengan target triwulan II sebesar 70, tercapai sebesar 78,84;
18. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) dengan triwulan II sebesar target 80, tercapai sebesar 100.

4.1. Permasalahan Dan Tindak Lanjut

Selama triwulan II T.A. 2024, ada beberapa permasalahan yang di hadapi BBRBLPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran beberapa aset BMN tidak dapat dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap target capaian PNBP balai dari pendapatan fungsional, tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan capaian pada akhir triwulan II. Secara keseluruhan pendapatan PNPB tercatat pada aplikasi di akhir bulan Juni sebesar 21% dari target perencanaan sebesar

45% dengan total target nilai PNBP Balai berdasarkan Dokumen perjanjian kinerja sejumlah Rp. 552.000.000,-.

4.2. Saran Dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Sementara mengikuti arahan plt kepala Balai bahwa aset BMN yang telah digunakan untuk kegiatan SFV diupayakan tetap berjalan sesuai dengan kemampuan organisasi, dan aset BMN yang lainnya disarankan untuk dilakukan pembersihan/pemeliharaan berdasarkan dari skala prioritas.

4.3. Kesimpulan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II TA. 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BBRBLPP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahunan 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BBRBLPP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

LAMPIRAN



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wawan Andriyanto**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya
Laut dan Penyuluhan Perikanan



Wawan Andriyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.701
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	368
		4	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0,5520
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	49
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	11
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	9
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	1
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5
		14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Data Anggaran

No.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.218.184.000,-
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	61.146.934.000,-
Total Anggaran Balai Besar Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan		64.365.118.000,-

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya
Laut dan Penyuluhan Perikanan


Wawan Andriyanto



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wawan Andriyanto**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya
Laut dan Penyuluhan Perikanan

Wawan Andriyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.701
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	368
		4	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0,5520
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (Unit)	49
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	11
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	9
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	1
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5
		14	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80

Data Anggaran

No.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.377.964.000,-
2	Program Dukungan Manajerial	61.136.934.000,-
Total Anggaran Balai Besar Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan		64.514.898.000,-

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya
Laut dan Penyuluhan Perikanan



Wawan Andriyanto



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

SK PENGELOLA KINERJA TAHUN 2025



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

JALAN RAYA SINGARAJA – GILIMANUK (KILOMETER – GLM, 39)
BD. GONDOL, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG, BALI (81155)
TELEPON (0362) 92278, Email : gondol.bbpbpl@gmail.com, website : www.kkp.go.id/brsdm/bbrblgondol

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR : B. 128 /BRSDM–BBRBLPP/TU.110/I/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN
PERIKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN- KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2021 (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015- 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 84);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 148/KP.930/PNY-JF/IX/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLAAN KINERJA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Penanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Pelaksana :
 1. Ketua : Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di Lingkungan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan,
 2. Manajer Kinerja : Mengkoordinasikan – pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan unit yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.
 3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa :
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat :
 - 1) Visi, misi dan program
 - 2) Tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) Sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan ; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU)

- b. Indikator Kinerja :
 - 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal;
 - 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
 - 4) Ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.
 - c. Dokumen kontrak kinerja :
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK)
 - (a) tersusun dan selaras dengan dokumen RENSTRA dan PK atasannya;
 - (b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - (c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategis :
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategi/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
 - d. Rencana Aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. Seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/ Verifikasi:
- a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan / triwulan semesteran / tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;

- e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
 - f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di *upload* ke dalam *website* resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit oragnisasi masing-masing;
 - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - k. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternative perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
 - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - r. Memastikan seluruh *softcopy* data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi *online*; dan
 - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai :
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
 - c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja oragnisasi;
 - d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala pada unit organisasi masing-masing.

6. Sub-Tim Kinerja Penyuluhan :
- Menyelaraskan indikator kinerja penyuluhan dengan indikator kinerja organisasi;
 - Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja penyuluh;
 - Mengevaluasi hasil capaian kinerja penyuluh perikanan/capaian Indikator Kinerja Utama Penyuluh Perikanan setiap triwulan.
 - Menyampaikan hasil evaluasi penyuluh perikanan kepada Kepala BBRBLPP dan Puslatluh KP

- KETIGA** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/ pakar/ praktisi/ tenaga ahli/ konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola kinerja Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Perikanan serta Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- KELIMA** : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja BBRBLPP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2023;
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023;
- KETUJUH** : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Gondol
Pada tanggal 3 Januari 2023



Kuasa Pengguna Anggaran
BBRBLPP

awan Andriyanto, S.Pi, M.Sc



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan
Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.128/BRSDMKP-BBRBLPP/
TU.110/I/2023
Tentang : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Besar
Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan
Perikanan Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

a. Penanggung Jawab :

Wawan Andriyanto, S.Pi, M.Sc/ Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

b. Pelaksana :

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ida Komang Wardana, S.Si / Perencana Madya	Ketua
2.	Kadek Adi Chandra K., S.St.Pi., M.Pi/ APK APBN Madya	Manajer
3.	Wawan Andriyanto, S.Pi, M.Sc/ Humas Ahli Madya	Manajer
Tim Perencanaan Kinerja		
1.	I Komang Suarsana, S.PKP/ Perencana Muda	Koordinator
2.	Ernayanti Utami, S.Pi	
Tim Pengukuran Kinerja/ Pelaporan Kinerja/ Evaluasi Kinerja/ Verifikasi		
1.	Sujannah, S.Akt/ Perencana Muda	Koordinator
2.	Ni Luh Seri, A.Md/ Pengelola Monev	Anggota
Tim Kinerja Pegawai		
1.	Ni Luh Erawati, S.A.P./ Analis Kepegawaian Muda	Koordinator
2.	Syamsudin, A.Md/ Pengelola Kepegawaian	Anggota
3.	Afandi/ Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
Tim Kinerja Penyuluhan		
1.	Maria Niken Tri Ubaya Sakti, S.Pi./ Analis Kepegawaian Muda	Koordinator
2.	Hendro Ponco Wibowo, S.Pi.	Anggota
3.	I Gede Wahyu Suryawirawan, S.Pi.	Anggota
4.	Robyl Priatna	Anggota